

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Hasil Penelitian

- Afandi, A., 2000, Panen Raya 2000 Tragedi bagi Petani Padi, Suatu Studi Deskriptif Evaluasi atas Kebijakan Harga Dasar Gabah, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Akhmad, 2014, Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras Terhadap Surplus Produsen dan Konsumen, Jurnal Pertanian (online), Mei, Edisi 01, Tahun XX hal.14-31, <<http://perpustakaan.bappenas.go.id>>, Diakses 1 November 2016.
- Andriati, dan Sudana, W., 2011, Efektivitas Kebijakan Harga Input dan Output Usahatani Tanaman Pangan pada Berbagai Agroekosistem di Indonesia, Jurnal Penelitian Tanaman Pangan, Vol. 30, No.2, Hal. 137-144.
- Armas, E.B., Osiro, C.G., dan Dodson, M.B., 2010, *Agriculture Public Spending and Growth: The Example of Indonesia*, Economic Premise, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network, April 2010, Number 9
- Beattie, B.R dan Taylor, C.R., 1994. *The Economics of Production*, Diterjemahkan oleh Josohardjono, S., dengan judul Ekonomi Produksi, Yogyakarta: UGM Press.
- Chaeriyah, M., 2011, Dampak Subsidi Sektor Pertanian terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pertanian: Pendekatan Pendapatan Rumah Tangga SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) 2008, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Darwanto, D.H., 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. Ilmu Pertanian Vol.12, No.2, Hal 152-164.
- Darwanto, D.H., 2013, Sistem Kedaulatan Pangan sebagai Landasan Utama Kedaulatan Negara Republik, dalam Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, Suara Dari Bulaksumur, Diedit oleh Agus, A., dkk, Yogyakarta: UGM Press, hal. 51.
- Darwis, V., 2008, Keragaan Penguasaan Lahan sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.
- Darwis, V., dan Supriyati, 2013, Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya; Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 11, No.1, Hal 46-60.
- Dunn, W.N., 1994, *Public Policy Analysis: an Introduction, Secon Edition*, Diterjemahkan oleh Wibawa, S. dkk dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: UGM Press.

- Furoida, A. 2007. Pengaruh Kebijakan Harga Gabah terhadap Nilai Tukar Petani, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Goenardi, D.H., 2006, Pengelolaan Tanah sebagai Aset Sumber Daya Alam Tak Terbarukan melalui Pendekatan Probiotik, dalam Revitalisasi Pertanian, Dialog dan Peradaban, Diedit oleh Jusuf Sutanto dan Tim, Jakarta: PT Gramedia.
- Gujarati, D.N., dan Porter, D.N., 2010, *Basic Econometrics 5<sup>th</sup> ed*, Diterjemahkan oleh Mardanugraha, E. dkk dengan judul Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gujarati, D.N., dan Porter, D.N., 2012, *Basic Econometrics 5<sup>th</sup> ed*, Diterjemahkan oleh Mardanugraha, E. dkk dengan judul Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halcrow, H.G., 1984, *Agricultural Policy Analysis*, New York: McGraw Hill Book, Co.
- Harre, E.A., dan White, W.C., 1985. Profil Pasar Pupuk, dalam Teknologi dan Penggunaan Pupuk Edisi Ketiga, diedit oleh Engelstand, Yogyakarta: UGM Press, hal. 1.
- Hirshleifer, J., Glazer, A., and Hirshleifer, D., 2005, *Price Theory and Application, Decision, Markets, and Information, Seven Edition*, New York: Cambridge University Press.
- Indiyati, R., 2015, Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Ismail, A., 2011, Dampak Kebijakan dan Efektifitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras terhadap Kesejahteraan Petani Indonesia, <[http://web.ipb.ac.id/~lppm/lppmipb/penelitian/hasilcari.php?status=buka&id\\_haslit=PUF/020.11/ISM/d](http://web.ipb.ac.id/~lppm/lppmipb/penelitian/hasilcari.php?status=buka&id_haslit=PUF/020.11/ISM/d)>, Diakses 21 Juni 2017.
- Janti, G.I., 2015, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Kahesti, M.A, 2000, Pengaruh Penghapusan Subsidi Pupuk pada Usahatani Padi di Kabupaten Sleman, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Krisnamurthi, B., 2006, Revitalisasi Pertanian, Sebuah Konsekuensi Sejarah dan Tuntutan Masa Depan, dalam Revitalisasi Pertanian, Dialog dan Peradaban, Diedit oleh Jusuf Sutanto dan Tim, Jakarta: PT Gramedia.
- Krugman, P.R., Obstfeld, M., and Melitz, M.J., 2012, *International Economics, Theory and Policy, Ninth Edition*, Boston: Pearson Education, Inc,
- Machfoedz, M.M., 2013, Membangun Kedaulatan Pangan: Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Politik Nasional, dalam Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, Suara Dari Bulaksumur, Diedit oleh Agus, A., dkk, Yogyakarta: UGM Press, hal. 27

- Midgley, J., Tracy, M.B., and Livermore, M., (2000), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage Publication.
- Murtono, 2005, Studi Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jayapura, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. *Agriculture: Achieving Greater Food Security*, Indonesia Policy Brief OECD, March 2015.
- Pearson, S., Gotsch, C., and Bahri, S., 2005. Aplikasi Policy Analisis Matrix pada Pertanian Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prajanti, S.D.W., 2014, *Strategy for Controlling Agricultural Land Conversion of Paddy by Using Analytical Hierarchy Process in Central Java*. Management of Quality: an International Journal, Vol 25, No.5, Hal 631-647.
- Purwanto, D., 2016, Studi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan non Pertanian di Kabupaten Bantul, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Radjagukguk, B., 2006, Sumber Daya Tanah dan Pengelolaannya secara Berkelanjutan, dalam Revitalisasi Pertanian, Dialog dan Peradaban, Diedit oleh Jusuf Sutanto dan Tim, Jakarta: PT Gramedia.
- Rahayu, E.S., 2008, Analisis Dampak Kebijakan Harga terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia, Disertasi: Universitas Gadjah Mada.
- Ruswandi, A., Rustiadi, E., dan Mudikdjo, K., 2007, Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus di Daerah Bandung Utara, Jurnal Agro Ekonomi, Vol 25, No.2, Hal 207-219.
- Sawit, M.H., 2001. Kebijakan Harga Beras Periode Orba dan Reformasi, dalam Bunga Rampai Ekonomi Beras, Jakarta: LPEM-UI.
- Simatupang, P., and Timmer, C.P., 2008, *Indonesia Rice Production: Policies and Realities*, Buletin of Indonesia Economic Studies, Vol 44. No.1, Hal 65-79.
- Spicker, P., (1995), *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall.
- Subejo. Arifa, N.S.A.A., dan Mustofa M.H., 2014, 5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subejo, 2013, Memaknai Kemerdekaan Bangsa dan Kedaulatan Pangan, dalam Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, Suara Dari Bulaksumur, Diedit oleh Agus, A., dkk, Yogyakarta: UGM Press, hal. 85.
- Sudaryanto, T., dan Rusastra I.W., 2006, Kebijakan Strategi Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No.4, Hal 115-122.

- Sutaryono, 2013, *Kontestasi dan Marjinalisasi Petani Realitas Petani Negeri Agraris*, Yogyakarta: Zifatama Publishing.
- Syafa'at, N., Purwoto, A., Anugrah, I.S., Suryani, E., Noekman, K.M., Marisa, Y., Suryadi, M., dan Asikin, A., 2007, *Laporan Akhir Penelitian TA 2007, Kajian Ulang Kebijakan Subsidi dan Distribusi Pupuk*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C., 2006. *Economic Development, Ninth Edition*, Diterjemahkan oleh Munandar, S. dengan judul *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jilid Satu, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tomek, W.G., Robinson, K.L., 1972, *Agricultural Product Prices, Third Edition*, Ithaca: Cornell University Press.
- Thomson, N., (2005), *Understanding Social Work: Preparing for Practice*, New York: Palgrave
- Utami, H.H., 2000, *Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Nilai Tukar Petani: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis: Universitas Gadjah Mada
- Utami, S., 2002, *Pengaruh Penghapusan Subsidi Pupuk pada Usaha Tani Padi di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul*, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Widarjono, A., 2013, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wibowo, C.S., 2015, *Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Sawah pada Produksi Padi sampai Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan Wilayah*, Tesis: Universitas Gadjah Mada
- Widodo, S., 2012, *Politik Pertanian*, Yogyakarta: Liberty.
- Yustika, A.E., 2008, *Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Quaterly Review of the Indonesian Economi, Vol.9, No.3, Hal.1-7.

### **Data dan Dokumen Hasil Kajian Pemerintah**

- Badan Pusat Statistik, 2013a, *Sensus Pertanian 2013, Angka Nasional Hasil Survei ST 2013 – Subsektor Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 2014*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2013b, *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013, Pencacahan Lengkap*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2015a, *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014*, <<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1200>>, (Diakses 16 Februari 2016).

- Badan Pusat Statistik, 2015b, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2015c, Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) di Indonesia, 2008-2014, <<http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/947>>, (Diakses 3 Maret 2016).
- Badan Pusat Statistik, 2015d, Statistik Nilai Tukar Petani 2014, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, Tanpa tahun a, Konsep Nilai Tukar Petani, <<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22#subjekViewTab1accordion-daftar-subjek2>>, (Diakses 3 Maret 2016).
- Badan Pusat Statistik, 2016a, Pendapatan Nasional Indonesia, *National Income of Indonesia* 2011-2015, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2016b, Luas Lahan Menurut Penggunaan 2015, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2017a, Pendapatan Nasional Indonesia, *National Income of Indonesia* 2012-2016, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2017b, Statistik Nilai Tukar Petani, *Farmer Terms of Trade Statistics* 2016, Jakarta: BPS.
- Bappenas / Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2011, Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan, Jakarta: Bappenas / Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Bappenas / Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Japan International Cooperation Agency (JICA), 2013, Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019, Jakarta: Bappenas dan JICA.
- Bappenas / Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2015, Analisis Rumah Tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia: Sensus Pertanian 2013, Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- Bappenas / Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2015, Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- Kementerian Keuangan, 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2013a, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2013b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

- Kementerian Keuangan, 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*), Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pertanian, 2014a, Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian, 2014b. Statistik Lahan Pertanian 2009-2013, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian, 2015, Rencana Strategis kementerian pertanian 2015-2019, Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian, 2016, Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011-2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Japan International Cooperation Agency (JICA), 2013, Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019, Jakarta: BAPPENAS dan JICA.

### **Produk Hukum**

- Kementerian Keuangan, 2003, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.06/2003 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk.
- Kementerian Keuangan, 2004, Keputusan Menteri Keuangan nomor 319/KMK.06/2004 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2004.
- Kementerian Keuangan, 2005, Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun anggaran 2005.
- Kementerian Keuangan, 2006, Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006.
- Kementerian Keuangan, 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2007 tentang tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

- Kementerian Keuangan, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.
- Kementerian Keuangan, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.
- Kementerian Pertanian, 2011, Peraturan Menteri Kuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.
- Kementerian Pertanian, 2011a, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
- Kementerian Pertanian, 2011b, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
- Kementerian Pertanian, 2011c, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.
- Kementerian Pertanian, 2012, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- Kementerian Pertanian, 2013b, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- Kementerian Pertanian, 2013c, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
- Kementerian Pertanian, 2014c, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia, 2009a, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.



Republik Indonesia, 2009b, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Republik Indonesia, 2012, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Republik Indonesia, 2013, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Republik Indonesia, 2015, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.